

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur**

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Menurut Solekhan (dalam Romantis, 2015) Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat.

Sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki 3 tahap yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pertanggungjawaban. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan prinsip yang berlaku, Sebagaimana dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa, menyebutkan bahwa prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- c. ADD yang digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai indikator akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diawali dengan musyawarah dan hasil musyawarah tersebut tertuang di dalam peraturan desa. Alokasi Dana Desa sebagai salah satu pendapatan transfer desa yang gunanya adalah untuk memberi stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat, maka dana tersebut harus digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan di desa tersebut.

Menurut Indah (2017) ada 2 faktor *pertama* Transparansi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas karena transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan jelas jumlah keuangan yang masuk ke desa beserta jenis-jenis pembangunan ditingkat desa dalam rangka memanfaatkan uang tersebut. Semua itu tidak terlepas dari pengawasan pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Maka Pemerintah Desa Condongcatur harus mampu memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat agar terwujudnya pemerintahan yang baik.

Selain transparansi yang merupakan kunci terciptanya good governance, *kedua* partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh tanpa masyarakat setiap pembangunan akan gagal, karena masyarakat sangat berpengaruh dalam setiap kegiatan yang ada di pemerintah desa. Partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat dapat memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran yang biasa disebut dengan swadaya masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang ditransfer dari kabupaten untuk kegiatan operasional desa dan pemberdayaan masyarakat. Maka Pemerintah Desa Condongcatur berharap kepada masyarakat agar tidak bosan selalu memberikan usulan-usulan, walaupun usulan tersebut belum tentu terealisasi tetapi setidaknya masyarakat memberikan partisipasinya demi pembangunan Desa Condongcatur yang lebih baik. Menjadikan pemerintahan yang akuntabel harus memiliki ciri ciri sebagai berikut:

### **3.1.1 Mampu Menyajikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Secara Terbuka, Cepat, dan Tepat Kepada Masyarakat.**

Informasi merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan keuangan desa, biasanya pemerintah desa memberikan informasi tersebut melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan transfer desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa Condongcatur melakukan Musduk (Musyawarah Padukuhan) dan

Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa). Musduk dan Musrenbangdes merupakan forum musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pembangunan desa. Dalam musyawarah tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan usulannya yang kemudian akan dibahas bersama. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur mengatakan :

*“Untuk perencanaan Alokasi Dana Desa kita melakukan musrenbangdes atau musyawarah desa yang sebelumnya kita rembuk dalam musduk (musyawarah padukuhan). gunanya musduk adalah untuk meprioritaskan pembangunan setiap padukuhan, setelah dari musduk nanti baru disampaikan ke desa lalu dibahas dalam musrenbangdes. Dalam musrenbangdes nanti desa akan membiayai apa yang menjadi prioritas pembangunan”. (wawancara, 27 Februari 2018)*

Dengan demikian perencanaan yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, supaya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Condongcatur mengenai pengelolaan dana ADD dan selanjutnya pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Desa Condongcatur harus mampu menerapkan prinsip transparansi jika ingin menjadikan pemerintahan yang lebih baik. Transparansi merupakan cara pemerintah memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah secara terbuka kepada masyarakat, karena masyarakat berhak mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya mengenai penyelenggaraan pemerintah desa.

Tetapi Pemerintah Desa Condongcatur tidak memberikan informasi terkait penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa secara terperinci, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Mulyani selaku Bendahara Desa Condongcatur. Beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk ADD kita tidak bisa memberikan informasi add secara rinci terkait kegiatan yang menggunakan dana dari add tetapi hanya secara global bahwa APBDes rinciannya itu adalah untuk pelaksanaan pemerintahan brpa % untuk pembangunan brpa % kemudian untuk kesejahteraan brpa % dan yang lainnya brpa % semua itu ada pada APBDes yang disendirikan hanya dana desa”. (Wawancara, 28 Februari 2018)*

Dengan demikian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Condongcatur belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, padahal seperti yang kita ketahui bahwa di dalam UU Desa telah tertulis bahwa pemerintah desa wajib memberikan informasi secara massif kepada masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi secara cepat dan tepat terkait dengan penggunaan dana ADD, dari situ masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sudah baik atau belum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulyani selaku Bendahara Desa Condongcatur beliau mengatakan :

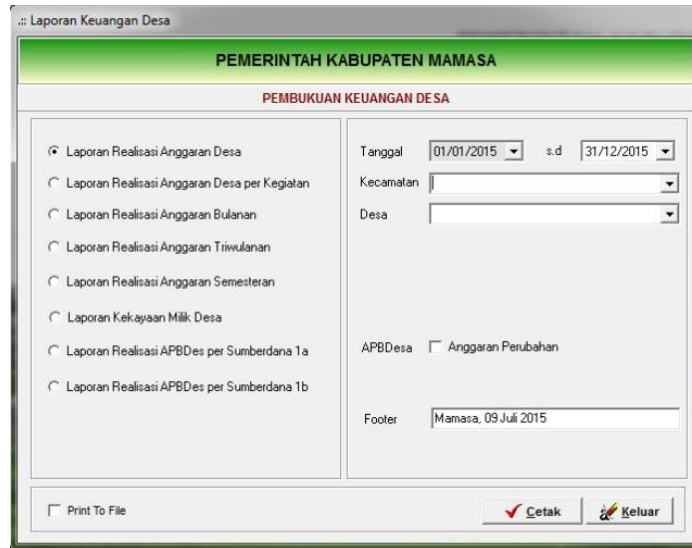
*“untuk transparansi mengenai add kita agak kesulitan karena itu kita harus membaca di laporan pertanggungjawaban APBDes, Transparansi hanya sebatas ketika ada musduk diwilayah padukuhan rw itu kita sampaikan, bahwa add kita gunakan untuk ini. Tetapi karena penggunaan add itu bisa bermacam macam jadi kita agak kesulitan untuk memberikan laporan yang seperti itu”. (Wawancara, 28 Februari 2018)*

Berdasarkan wawancara tersebut Pemerintah Desa Condongcatur sudah memberikan informasi melalui Musyawarah Padukuhan tetapi Pemerintah Desa Condongcatur tidak memberikan informasi terkait penggunaan dana ADD secara terperinci, prinsip pemerintah Desa Condongcatur hanya sebatas masyarakat paham dana dari ADD sudah digunakan untuk pembangunan desa. Pemerintah Desa Condongcatur tidak memberitahu dana ADD sudah digunakan untuk kegiatan apa saja, jika masyarakat ingin mengetahui semua dana ADD yang sudah digunakan untuk pembangunan desa bisa melihatnya di APBDes. Karena pemerintah Desa Condongcatur tidak memberikan laporan khusus mengenai ADD, semua penggunaan anggaran desa salah satunya adalah ADD sudah di anggarkan di dalam APBDes.

Sedangkan Desa Condongcatur pada tahun 2016 belum menggunakan SISKEUDES, sehingga pemerintah Desa Condongcatur sedikit kesulitan untuk memberitahu laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana kepada masyarakat. Beda dengan tahun 2017 Desa Condongcatur sudah menggunakan Siskeudes, jadi dalam aplikasi Siskeudes ada menu yang namanya adalah Laporan Pembukuan gunanya adalah untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, salah satunya yaitu Laporan Realisasi Anggaran Per Sumber Dana ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)).

**Gambar 3.1**

**Menu Laporan Pembukuan dalam Siskeudes**



**Sumber : [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)**

Dari gambar di atas sudah terlihat bahwa ada beberapa sub menu salah satunya adalah laporan realisasi APBDes per sumber dana. Jika masyarakat ingin mengetahui laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana secara rinci Pemerintah Desa Condongcatur bisa memberikan dengan mudah dan cepat karena sudah menggunakan Sikeudes otomatis anggaran akan di cetak per sumber dana yang diinginkan masyarakat tersebut melalui menu laporan pembukuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reno selaku Kepala Desa mengatakan :

*“Kalau kegiatan untuk perencanaan semuanya melalui musyawarah padukuhan dan musrenbangdes dari situ masyarakat dapat menyampaikan usulan usulannya, kemudian usulan tersebut kami tampung dan kami voting semua usulan tersebut mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu”. (Wawancara, 27 Februari 2018)*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat, karena semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Dengan demikian semua perencanaan yang disepakati dan ditujukan kepada masyarakat harus bersifat transparan. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Maka dapat disimpulkan bahwa informasi memiliki peran penting dalam pengelolaan ADD terutama informasi kepada masyarakat, masyarakat tidak akan mengetahui pembangunan apa saja yang menggunakan dana dari ADD jika pemerintah desa tidak memberikan informasi tersebut.

**Tabel 3.1**  
**Penggunaan Anggaran ADD Desa Condongcatur tahun 2016**

No	Uraian	Besarnya (Rp)
1.	Pendapatan	
	a. Pendapatan Transfer	
	Alokasi Dana Desa	Rp. 2.111.163.325
	b. Pendapatan Lain-Lain	
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp. 28.443.193
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.139.606.518



2.	Belanja	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 5.957.537.571
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 121.373.500
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 596.310.650
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.202.343.200
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 22.500.000
	Jumlah Belanja	Rp. 7.900.064.921
	Surplus/Defisit	Rp. 2.402.108.267
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.267.672.942
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. –
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 10.267.672.942

*Sumber: Kantor Desa Condongcatur (27 Februari 2018)*

Jika dilihat dari tabel penggunaan ADD pada Desa Condongcatur membuktikan bahwa pemerintah Desa Condongcatur tidak menyampaikan secara terperinci hanya sekedar memberi informasi dananya digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan desa. Semua itu sudah ada di APBDes Condongcatur.

Seperti yang dikatakan Bapak Reno selaku kepala Desa Condongcatur:

*“kita menyarankan kepada masyarakat jika ingin mengetahui penggunaan sumber dana dari ADD silahkan datang ke kantor langsung untuk menanyakan terkait dana ADD tersebut”. (Wawancara, 27 Februari 2018)*

Jadi, Jika masyarakat ingin mengetahui informasi mengenai penggunaan anggaran ADD di Desa Condongcatur digunakan untuk apa saja secara terperinci, maka masyarakat harus datang ke kantor desa dan menanyakan kepada pegawai yang ada di kantor desa. selain itu, masyarakat bisa langsung hubungi melalui chat grup desa jika malas untuk kak kantor desa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur bahwa :

*“Terkait dengan informasi mengenai anggaran yang berasal dari ADD digunakan untuk apa saja sudah kita cantumkan di APBDes kita, jika masyarakat ingin mengetahui silahkan datang ke kantor desa atau melalui sosial media seperti pada wa grup desa. jadi pada saat musyawarah desa pemerintah desa hanya menyampaikan point-pointnya saja kalau mau tahu secara terperinci ya datang ke kantor desa”. (Wawancara, 27 Februari 2018)*

Maka penulis dapat menyimpulkan jika informasi mengenai penggunaan dana ADD sebenarnya sudah disampaikan secara langsung melalui Musrenbangdes tetapi tidak secara terperinci hanya sebatas masyarakat paham dana dari ADD tersebut sudah digunakan, tanpa harus menjelaskan secara terperinci karena semuanya sudah ada di dalam APBDes Desa Condongcatur.

Masyarakat mempunyai kesibukan masing-masing, kebanyakan dari masyarakat tidak peduli mengenai anggaran desa digunakan untuk apa, jadi kebanyakan dari masyarakat tidak peduli atau justru malas untuk datang ke kantor desa jika hanya sekedar menanyakan mengenai pembangunan yang menggunakan anggaran dari ADD. Masyarakat datang ke kantor desa jika memang ada kepentingan yang lain bukan untuk menanyakan penggunaan anggaran. Jadi tugas pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat secara terperinci, cepat dan tepat karena itu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pembangunan desa pada saat musrenbangdes.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irwan selaku tokoh masyarakat Desa Condongcatur mengatakan :

*“untuk transparansi saya kira sudah cukup transparan karena kita sebagai masyarakat selalu dilibatkan dalam musrenbangdes, tetapi kita sebagai masyarakat belum puas dengan informasi yang didapat hanya melalui musrenbangdes seharusnya pemerintah desa memanfaatkan papan informasi yang ada di Desa sebagai sarana informasi mengenai program ADD”. (Wawancara, 27 Februari 2018)*

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Condongcatur sebenarnya sudah cukup transparansi dalam penggunaan dana ADD karena di setiap musrenbangdes masyarakat selalu dilibatkan, tetapi masyarakat belum puas dengan informasi yang disampaikan melalui musrenbangdes. Masyarakat menginginkan pemerintah desa membuat laporan penggunaan dana ADD secara terperinci dan di tempel pada papan informasi yang ada di desa.

**Gambar 3.2**

***Papan Informasi Desa Condongcatur***



***Sumber : Diolah dari data dokumentasi (27 Februari 2018)***

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat adanya papan informasi di Desa Condongcatur, gambar diatas merupakan papan informasi yang dimiliki Desa Condongcatur dalam papan informasi tersebut tidak ada sama sekali informasi terkait dengan penggunaan Anggaran Desa, dalam papan informasi tersebut hanya ada informasi mengenai pemilu serentak, lowongan pekerjaan dll. Hal itu membuktikan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur tidak memberikan informasi terkait penggunaan anggaran melalui papan informasi tersebut.

### **3.1.2 Mampu Memberikan Pelayanan yang Memuaskan Bagi Publik**

Pemberian pelayanan yang baik yang diharapkan masyarakat adalah lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri. adapun bentuk pelayanan pemerintah desa condongcatur kepada masyarakat, jika masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

Pemerintah Desa Condongcatur sudah cukup responsif maksudnya adalah pemerintah sudah cepat tanggap dalam menanggapi setiap kepentingan publik. karena masyarakat merupakan sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan dan ada saatnya masyarakat akan merasakan kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan masyarakat pasti akan menuntut suatu proses yang lebih mudah dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Irwan selaku tokoh masyarakat bahwa:

*“Pemerintah Desa Condongcatur sudah cukup tanggap dalam memberikan pelayanan, contohnya tahun 2016 ada kegiatan pembangunan drainase yang tujuannya supaya pada saat hujan deras sudah tidak ada jalan yang tergenang air”. (Wawancara, 27 Februari 2018)*

**Tabel 3.2**  
**Bidang Pembangunan Drainase**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Manfaat	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembangunan Drainase	Rt 02 dan Rt 06 Padukuhan Tiyasan	Mengurangi Air Hujan	1 Bulan
2.	Drainase	Rw 01 dan Rw 02 Padukuhan Tiyasan	Menanggulangi Banjir	2 Bulan
3.	Drainase Peresapan Jal. Gambuh & Jl.Mijil	Rw. 64, Padukuhan Manukan	Penanggulangan Banjir	3 Bulan
4.	Pembangunan Drainase	Jl. Kemuning Padukuhan Sanggrahan	Penanggulangan Banjir	3 Bulan
5.	Drainase	Jl. Sendang Sari, Padukuhan Gempol	Tadah Air Hujan	1 Bulan
6.	Drainase	Rt 18, Padukuhan Gempol	Menanggulangi Banjir	1 Bulan
7.	Drainase	Rt 06, Padukuhan Gempol	Tadah Air Hujan	1 Bulan
8.	Drainase	Rt 05, Padukuhan Gempol	Tadah Air Hujan	1 Bulan
9.	Drainase	Rw 16, Padukuhan Dero	Menanggulangi Banjir	5 Bulan
10.	Drainase BH/H : 60/70	Rt 22 s/d 26, Rw 61 Padukuhan Dero	Menanggulangi Banjir	4 Bulan
11.	Drainase	Rt 06 Rw 62 Padukuhan Ngropoh	Mengatasi Genangan Air Hujan	1 Bulan
12.	Drainase	Rt 10, Rw 62 dan Rw 25	Mengatasi Genangan	1 Bulan
13.	Drainase	Rw 26, 27, 23 Jl. Wahid Hasyim	Menanggulangi Banjir	6 Bulan
14.	Drainase	Jl. Kaliwaru, Jl Waru, Munggur, Padukuhan Kaliwaru Gg.	Menanggulangi Banjir	6 Bulan
15.	Drainase	Jl. Prayan 2 Padukuhan Soropadan	Menanggulangi Banjir	1 Tahun
16.	Drainase	Rt. 02 Rw 39 Jl. Barada Puren	Memperlancar Air Hujan	1 Bulan

17	Drainase	Jl. Harjuno-Galungan Rw 48, Padukuhan Kentungan	Kelancaran Air Hujan	1 Bulan
----	----------	---	----------------------	---------

*Sumber : Kantor Desa Condongcatur (27 Februari 2018)*

Data di atas merupakan data pembangunan drainase di setiap Padukuhan, dari data tersebut sudah membuktikan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur sudah cukup tanggap mengenai keinginan warganya di setiap Padukuhan Desa Condongcatur. Sebagai contoh padukuhan Dero, peneliti beberapa kali lewat padukuhan tersebut pada saat turun hujan air akan menggenang karena tidak adanya saluran air. Tetapi setelah ada drainase sudah tidak separah dulu genangan airnya jika terjadi turun hujan, itu membuktikan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur selalu bergerak cepat terhadap keluhan dari masyarakat.

### ***Gambar 3.3***

#### ***Proses pelaksanaan pembangunan drainase***



***Sumber : Diolah dari data dokumentasi Desa Condongcatur***

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan atau program yang sudah di rencanakan bernilai baik dan berhasil jika bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat itu sendiri. salah satu contoh sebagai bahan analisis, penulis mengambil kegiatan atau program pada pemanfaatan dari ADD tahun 2016 dalam pembangunan

fisik atau infrastruktur salah satunya adalah pembangunan drainase yang merupakan sumber pembiayaan dari anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Condongcatur, adapun output dari pembangunan drainase yaitu jika terjadi hujan deras maka tidak ada lagi jalanan yang tergenang air apalagi sampai banjir karena sudah ada drainase yang dibangun di setiap padukuhan.

Selain hasil yang didapatkan dari pembangunan infrastruktur Pemerintah Desa Condongcatur juga menggunakan anggaran dari ADD untuk program pemberdayaan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Bapak Reno Selaku Kepala Desa Condongcatur mengatakan :

*“selain dari program pembangunan fisik kita juga menggunakan dana dari ADD untuk program pemberdayaan masyarakat contohnya seperti kegiatan ibu pkk ada kerajinan, budidaya, pertanian, bank sampah semua kegiatan tersebut kita berikan 1 jt setiap tahunnya”. (Wawancara, 27 Februari 2018)*

Dalam aspek efisiensi ini peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa sudah sangat bagus dalam pemanfaatan ADD tersebut karena semuanya diperuntukan untuk kegiatan yang berguna bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa Condongcatur.

Secara sederhana efektif adalah tercapainya sebuah sasaran sedangkan untuk efisien adalah bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan atau bisa dikatakan hemat. Hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan dapat meminimalisir hal-hal atau prosedur yang ada tanpa mengurangi efektivitasnya.



Berdasarkan wawancara dengan bapak Irwan selaku tokoh masyarakat mengatakan :

*“Saya kira Pemerintah Desa Condongcatur sudah menjalankan programnya dengan efektif dan efisien dimana program yang telah dirancang sudah mencapai sasaran dan rencana penggunaan dana, selain itu juga pelaksanaan program ADD sudah dikerjakan tepat waktu seperti yang direncanakan”.* (Wawancara, 27 Februari 2018)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat di simpulkan bahwa Pemeintah Desa Condongcatur sudah melaksanakan program ADD dengan cukup baik, walaupun terkadang masih ada sedikit kendala dalam pembangunan seperti keadaan cuaca saat turun hujan otomatis pembangunan dihentikan sementara, hal itu yang membuat terkadang program pembangunan tidak selesai tepat waktu. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur bahwa :

*”Program sudah sesuai dengan target yang direncanakan, semua program pasti ada terkendala seperti cuaca, alam itu biasanya agak molor kemudian terkendali tukang karena tidak mudah mencari tukang di sini.”* (Wawancara, 27 Februari 2018)

**Tabel 3.3**

**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa  
Pemerintah Desa Condongcatur Tahun 2016**

No	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Pendampingan Pelatihan Pertanian dan Perikanan	Rp. 11. 617.000	Rp. 10.052.000,00
2.	Pendampingan Pelatihan Pengelolaan Sampah	Rp. 7.245.000,00	Rp. 7.245.000,00
3.	Pembinaan Gapoktan	Rp. 9.765.000,00	Rp. 8.390.000,00
4.	Program Kali Bersih	Rp. 15.276.500,00	Rp. 14.876.500,00
5.	Kegiatan Pemberian Bantuan Stimulan Pembangunan di Padukuhan	Rp. 1.161.780.000,00	Rp. 1.161.779.700,00

*Sumber : APBDes Tahun 2016 (27 Februari 2018)*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap anggaran yang sudah diberikan kepada Pemerintah Desa Condongcatur selalu digunakan sesuai dengan rencana pembangunan Desa Condongcatur. Di dalam data tersebut juga sudah jelas bahwa anggaran yang terealisasi tidak pernah melebihi anggaran yang sudah direncanakan. Hal itu membuktikan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur sudah menjalankan program ADD dengan efektif dan efisien karena program yang telah dirancang sudah mencapai sasaran dan penggunaan dana.

**3.1.3 Mampu Memberikan Ruang Bagi Masyarakat Untuk Terlibat dalam Proses Pembangunan dan Pemerintahan.**

Pemerintah Desa Condongcatur mampu memberikan ruang bagi masyarakat artinya masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan usulan-usulan yang di inginkan terkait pembangunan desa. peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat penting, karena masyarakat juga bagian dari anggota Pemerintah Desa,

setiap pembangunan yang ada di Desa Condongcatur tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Masyarakat Desa Condongcatur dapat berpartisipasi pada waktu Musyawarah Padukuhan (Musduk) dalam musyawarah tersebut masyarakat berhak menyampaikan semua usulan yang di inginkan dilingkungannya masing- masing.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur bahwa :

*”Setiap perencanaan kita melakukan Musduk terlebih dahulu yang tujuannya adalah untuk memprioritaskan keinginan dari setiap Padukuhan, dalam musyawarah tersebut masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan semua usulannya”. (Wawancara, 27 Februari 2018)*

### ***Gambar 3.4***

#### ***Musyawarah Padukuhan di Padukuhan Pikgondang***



***Sumber : Diolah dari data dokumentasi Desa Condongcatur***

Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam Musduk saja tetapi dalam Musrenbangdes masyarakat juga masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur mengatakan :

*“setelah melakukan Musduk kita melakukan Musrenbangdes tujuannya untuk membahas hasil dari setiap Musduk, disitu masyarakat juga masih diberi kesempatan untuk berargumen”*. (Wawancara, 27 Februari 2018)

### **Gambar 3.5**

#### ***Musyawarah perencanaan pembangunan desa 2016***



***Sumber : Diolah dari data dokumentasi Desa Condongcatur***

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Condongcatur dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Condongcatur sudah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan semua usulannya. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Condongcatur sudah cukup baik. Karena di setiap perencanaan, Pemerintah Desa Condongcatur selalu mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Masyarakat juga selalu menghadiri di setiap musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Condongcatur baik Musyawarah Padukuhan Maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Walaupun

dalam Musrenbangdes yang hadir hanya perwakilan perwakilan di setiap padukuhan, Desa Condongcatur memiliki 18 Padukuhan setiap Padukuhan ada 5 orang yang mewakili.

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Mulyani selaku Bendahara Desa Condongcatur bahwa :

*“setiap Musrenbangdes kita mengundang perwakilan dari setiap Padukuhan yang ada di Condongcatur, biasanya ada 5 orang yang mewakili di setiap Padukuhan dari 18 Padukuhan yang ada di Desa Condongcatur”. (Wawancara, 28 Februari 2018)*

Semua perwakilan dari setiap Padukuhan rata-rata hadir dalam Musrenbangdes dapat dilihat dari daftar hadir masyarakat yang datang untuk melakukan Musyawarah Pembangunan Desa Condongcatur pada tahun 2016.

**Tabel 3.4**  
**Daftar Kehadiran Masyarakat**

No	Nama	Alamat
1.	Ny. Teguh s	Pondok
2.	Ny. Suparman	Sanggrahan
3.	Ny. Lidya	Gejayan
4.	Sardjiman	Manukan
5.	Menik	Manukan
6.	Edy	Pringwulung
7.	Ny. Sukarjo	Soropadan
8.	Suparmi	Gejayan
9.	Purwanti	Joho

10.	Yatimin	Pondok
11.	Suprihatin	Sanggrahan
12.	Sunaryo	Ngropoh
13.	Heri	Ngropoh
14.	Giman	Manukan
15.	Marsiah	Gempol
16.	Marheni	Tiyasan
17.	Saudah	Ngropoh
18.	Susetyanto	Ngropoh
19.	Sudara	Pandean
20.	Fasihah	Dabag
21.	Retnaningsih	Joho
22.	Kristini	Dero
23.	Andriyani	Pondok
24.	Muji Purwanto	Gorongon
25.	Ponijo	Gejayan
26.	Ridwan	Kayen
27.	Wasiyati	Pondok
28.	Suyadi	Pondok
29.	Sudarno	Sengkan
30.	Marsano	Joho
31.	Nur winarsih	Pondok
32.	Magiri Dewa	Perumnas concat
33.	Krisna	Jl. Kaliurang
34.	Teguh	Kaliwaru
35.	Bambang	Gandok
36.	Heru	Pondok
37.	Sardjono	Pikgondang
38.	Aulia	Tiyasan
39.	Bagaskoro	Pandean

40.	Dian	Sanggrahan
41.	Dewi	Sanggrahan
42.	Lilik	Dero
43.	Irwan	Dero
44.	Sutiadji	Ngringin
45.	Mustolih	Soropadan
46.	Apri	Soropadan
47.	Erni	Kaliwaru
48.	Edy Purnomo	Dabag
49.	Murdiyanto	Joho
50.	Samuel	Gempol
51.	Slamet	Gorongon
52.	Sugiharto	Joho
53.	Eko	Kentungan
54.	Dwiyanta	Pringwulung
55.	Nurul	Ngringin
56.	Deddy	Kayen
57.	Rebo ridho	BKM
58.	Maryati	Karangasem
59.	Tugiman	Ngringin
60.	Rupi	Tiyasan
61.	Sugina	Kaliwaru
62.	Tiwik	Pikgondang
63.	Sabar	Pohruboh
64.	Sunarya	Pondok
65.	Gunanda	Tiyasan
66.	Fendy	Dabag
67.	Eko nur zaman	Dabag
68.	Kasiyem	Kayen
69.	Sri lestari	Gandok

70.	Harsono	Kayen
71.	Sadikin	Pondok
72.	Sugiyatno	Gorongan
73.	Kadaryanto	Pondok
74.	Barimin	Joho
75.	Hery Sp	Dabag
76.	Fernandya	Pikgondang
77.	Sunarti	Pondok
78.	Tina prima	Gandok
79.	Fitri	Pandean
80.	Juwari	Dero
81.	Sarjio	Gorongan
82.	Supriyono	Sengkan
83.	Kuwat	Dero
84.	Siti R	Pondok
85.	Marwiyah	Joho
86.	Budi	Joho
87.	Andre	Leles
88.	Paipri	Leles
89.	Poniman	Leles
90.	Hasyim	Pondok

Daftar hadir pada tabel diatas merupakan partisipasi masyarakat untuk perencanaan program RKPDes untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah tersebut pemerintah Desa Condongcatur menyerap aspirasi masyarakat dan mengakomodir semua masukan dari masyarakat.



Seperti pada wawancara dengan Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur mengatakan :

*“Pemerintah desa mengakomodir semua masukan dari masyarakat, pertama masyarakat berhak mengusulkan dilingkungan masing masing sesuai dengan kebutuhan prioritas sehingga usulan itu memang usulan yang dibutuhkan sebagai prioritas”. (Wawancara, 27 Februari 2018)*

Musrenbangdes tujuannya adalah untuk membahas semua usulan dari masyarakat pada saat musyawarah padukuhan, dalam Musrenbangdes tersebut pemerintah akan memberikan dana untuk pembangunan yang sudah menjadi prioritas pemerintah desa.

hal itu disampaikan oleh Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur bahwa :

*“Semua usulan dari masyarakat kita terima terlebih dahulu lalu kita menyebut dilevel, jadi di setiap padukuhan kita prioritaskan selanjutnya kita prioritaskan lagi mana yang harusnya dapat diprioritaskan nanti bakal ada prioritas 1,2,3 jika prioritas 1 sudah terpenuhi baik itu pendanaan dari Pempusat atau Pem Diy atau Pemkab atau pemdes berarti yang ke 2 nanti menjadi prioritas sampai prioritas yang selanjutnya seperti itu”. (Wawancara, 27 Februari 2018)*

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektivitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Maka semua perencanaan yang sudah disepakati juga harus transparan, dapat diketahui

oleh seluruh masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawab. Seperti yang dikatakan oleh bapak Irwan selaku tokoh masyarakat mengatakan :

*“saya senang bisa ikut berpartisipasi dalam musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dalam musyawarah tersebut kami dilibatkan untuk pembuatan keputusan, perencanaan atau kebijakan ADD”. (Wawancara, 27 Februari 2018)*

**Gambar 3.6**

***Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes***



***Sumber : Diolah dari data dokumentasi Desa Condongcatur***

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan baik dalam perencanaan maupun pengawasan karena pembangunan tersebut nantinya bakal menjadi milik bersama. Selain memberikan usulan-usulan kepada Pemerintah Desa pada saat Musrenbangdes, masyarakat juga berhak mengetahui jumlah dana yang didapatkan oleh desa. karena itu adalah salah satu tugas masyarakat sebagai pengawas dalam pengelolaan dana yang bersumber dari ADD.

Ketika masyarakat mengetahui jumlah sumber dana dari ADD yang diterima oleh Desa, maka masyarakat berhak protes jika pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan dan jumlah dana yang diberikan kepada Desa.

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur bahwa :

*“Dalam pengawasaan, ketika kita menyerahkan bantuan kita lakukan pertemuan terbuka maksudnya adalah kita lakukan rapat padukuhan kita serahkan pada saat rapat tersebut dan disaksikan langsung oleh masyarakat. Artinya masyarakat mengetahui bahwa sepenuhnya dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan perencanaan. Jika tidak sesuai dengan perencanaan masyarakat disarankan untuk datang langsung ke kantor desa”.*  
(Wawancara, 27 Februari 2018)

Pengawasan merupakan kunci terpenting dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, selain dari Pemerintah Desa yaitu BPD sebagai pengawas. Masyarakat maupun pemerintah pusat juga mempunyai kebebasan mengawasi serta mendapatkan informasi mengenai ADD yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

#### **3.1.4 Mampu Menjelaskan dan Mempertanggungjawabkan Setiap Kebijakan Publik Secara Proporsional.**

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan. selain itu, pertanggungjawaban juga sebagai bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mulyani selaku Bendahara Desa Condongcatur mengatakan bahwa :

*“Kalau untuk ADD kita pertanggungjawabannya hanya dalam bentuk SPJ saja, karena kita tidak melaporkan secara tersendiri tentang penggunaan ADD. Jadi laporan kita hanya dalam bentuk laporan apbdes, karena kita tidak diwajibkan untuk itu. yang diwajibkan untuk membuat laporan tersendiri itu hanya dana desa”. (Wawancara, 14 November 2017)*

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur sudah mempertanggungjawabkan semua kegiatan melalui SPJ. Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, pada pasal 14 (1) menjelaskan bahwa penatausahaan ADD harus dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan dan SPJ dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara Desa.

Sedangkan untuk laporan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana ADD Pemerintah Desa Condongcatur tidak membuatnya secara tersendiri, semua laporan pelaksanaan sudah di akumulasikan di dalam APBDes. Hal itu dikatakan oleh Bapak Mulyani selaku Bendahara Desa Condongcatur bahwa :

*“Laporan ADD itu bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban semester 1 maupun 2 kemudian diakumulasi. Jadi laporan kita hanya dalam bentuk laporan apbdes”. (Wawancara, 14 November 2017)*

Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban Desa Condongcatur cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas semua kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD. Selain berupa SPJ bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Condongcatur mengenai semua kegiatan yang bersumber dari ADD juga harus dalam bentuk laporan khusus ADD. Jika dilihat dari hasil wawancara diatas laporan Desa Condongcatur hanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban APBDes. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mulyani selaku Bendahara Desa Condongcatur mengatakan bahwa :

*“dalam pertanggungjawaban administrasi masih sedikit kesulitan dalam mengelola penggunaan anggaran dari ADD, karena pada tahun 2016 kita itu pada posisi transisi jadi kita masih pada posisi keinginan”. (Wawancara, 14 November 2017)*

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa pada saat pengelolaan Keuangan Desa masih kesulitan karena belum adanya siskeudes pada tahun 2016. Jadi dalam APBDes Pemerintah Desa Condongcatur, tidak ada penjelasan mengenai setiap kegiatan sumber dananya bersal dari mana, karena dalam pengelolaan masih manual belum menggunakan siskeudes seperti saat ini.

Pelaporan merupakan kegiatan yang terpenting dalam setiap pelaksanaan kegiatan karena sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Condongcatur hanya dalam bentuk APBDes, sedangkan untuk laporan akhir mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang sumber dananya berasal dari ADD pemerintah desa tidak membuatnya secara tersendiri.

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Mulyani selaku Bendahara Desa Condongcatur mengatakan :

*“waktu itu dari pihak PMD menanyakan laporan akhir mengenai kegiatan yang menggunakan dana dari ADD, saya jawab untuk apa saya membuatnya jika tidak diperlukan. jika anda ingin mengetahui uang ADD saya untuk apa silahkan baca di APBDes saya”. (Wawancara, 14 November 2017)*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur hanya menyediakan laporan pertanggungjawaban APBDes, Di dalam APBDes tersebut sudah dicantumkan semuanya mengenai penggunaan anggaran desa. tetapi karena pada tahun 2016 pemerintah Desa Condongcatur masih dalam masa transisi dan belum menggunakan siskeudes jadi dalam APBDes nya belum ada penjelasan mengenai setiap program/kegiatan sumber dananya berasal dari mana.

**Tabel 3.5**  
**Rincian APBDes Desa Condongcatur Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pendapatan Desa	Rp. 5.063.102.392
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 14.346.597.625
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 133.845.000
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 640.840.500
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.205.683.500
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 27.000.000
	Jumlah Belanja	Rp. 16.353.966.625
	Surplus/Defisit	Rp. 11.290.864.233
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.267.672.942
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 10.267.672.942

*Sumber : APBDes Desa Condongcatur Tahun 2016*

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat secara terperinci mengenai dana yang diterimanya dan bakalan digunakan untuk apa saja dana ADD tersebut.

### **3.1.5 Adanya Sarana Bagi Publik Untuk Menilai Kinerja Pemerintah.**

Sarana informasi dalam konteks pembangunan di kawasan pedesaan sangat berperan penting, hal itu untuk menunjang bagaimana kinerja pemerintah dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa tersebut. Salah satu faktor penting kesuksesan pembangunan adalah tersedianya akses informasi pada masyarakat. Desa Condongcatur sebagai desa yang bisa dikatakan sudah sangat maju, tetapi dalam penyampaian informasi pemerintah Desa Condongcatur belum dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat.



Informasi merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan keuangan desa, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti memang ada papan informasi di Desa Condongcatur, tetapi di papan informasi tersebut hanya terdapat beberapa kertas yang ditempel dan itu adalah sebuah informasi mengenai pelelangan dan pengumuman yang tidak berkaitan dengan keuangan desa. sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui dana ADD tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja. Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur bahwa :

*“Masyarakat yang ingin mengetahui mengenai penggunaan dana terutama dana ADD bisa langsung chat di WA grup desa atau bisa langsung datang ke kantor Desa Condongcatur untuk menanyakan hal tersebut”.*  
(Wawancara, 27 Februari 2018)

Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Desa Condongcatur tidak menyampaikan informasi melalui papan informasi yang sudah di sediakan di Desa Condongcatur. Menurut peneliti papan informasi merupakan sarana yang mudah diakses oleh masyarakat selain website atau sosial media, Mengingat tidak semua masyarakat mengerti tentang teknologi. Selain itu juga pemerintah Desa Condongcatur belum mempunyai website resmi, hal itu semakin mempersulit masyarakat Desa Condongcatur mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang menggunakan dana dari ADD.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Mulyani selaku Bendahara Desa Condongcatur bahwa :

*“untuk informasi mengenai penggunaan dana ADD kita hanya menyampaikan melalui musduk ataupun musrenbangdes dan untuk website resmi kita belum ada ”.* (Wawancara, 28 Februari 2018)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pemerintah Desa Condongcatur dalam menyampaikan informasi tidak menggunakan website resmi, jika pemerintah desa tidak mempunyai website resmi dan tidak menggunakan papan informasi yang sudah disediakan bagaimana masyarakat akan mengetahui informasi mengenai semua kegiatan yang menggunakan dana dari ADD. Karena dua sarana tersebut adalah sarana yang paling mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, tanpa harus datang ke kantor desa hanya untuk menanyakan mengenai penggunaan keuangan desa. Mengingat kebanyakan masyarakat Desa Condongcatur yang sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing, hal tersebut menjadikan masyarakat semakin tidak peduli dengan keuangan desa yang mereka tahu usulan pada saat musduk ataupun musrenbangdes sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Irwan selaku tokoh masyarakat mengatakan :

*“saya tidak tahu kenapa pemerintah desa tidak memanfaatkan sarana informasi yang ada di desa, seperti papan informasi untuk menginformasikan mengenai penyelenggaraan program ADD, padahal itu penting dan cara termudah supaya seluruh masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat”.* (Wawancara, 27 Februari 2018)

Kesimpulannya pemerintah Desa Condongcatur sebenarnya sudah menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut dalam Musduk ataupun Musrenbangdes, Tetapi tidak secara terperinci. Pemerintah Desa Condongcatur hanya memberikan poin-point mengenai penggunaan dana ADD, karena menurut Pemerintah Desa Condongcatur penggunaan dana ADD sangat banyak jadi jika masyarakat ingin mengetahui secara terperinci dipersilahkan untuk datang kekantor dan menanyakan mengenai kegiatan yang menggunakan dana dari ADD karena pemerintah desa tidak membuat laporan khusus terkait dengan penyelenggaraan ADD.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat selain ada papan informasi di Desa Condongcatur, peneliti juga melihat sebuah baliho berukuran cukup besar yang isinya hanya mengenai penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Condongcatur. Di dalam baliho tersebut dijelaskan mengenai rincian belanja tahap 1 dan rincian belanja tahap 2. Semuanya sudah jelas setiap bantuan dana desa diberikan kepada setiap padukuhan yang membutuhkan. Pada tahap 1 ada 8 desa yang diberikan bantuan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Condongcatur. Sedangkan untuk tahap 2 ada 7 Padukuhan yang mendapatkan bantuan Dana Desa dari Pemerintah Desa Condongcatur.

Gambar 3.7

### Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Condongcatur



Sumber : Diolah dari data dokumentasi (27 Februari 2018)

Baliho tersebut baru dibuat Pemerintah Desa Condongcatur pada tahun 2017 bulan Desember karena sebelumnya belum ada anggaran untuk pembuatan baliho tersebut. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Reno selaku Kepala Desa Condongcatur mengatakan

*“mengenai baliho yang ada didepan kantor tersebut baru dibuat bulan Desember tahun 2017, karena sebelumnya belum ada anggaran untuk membuat seperti itu”.*  
(Wawancara, 27 Februari 2018)

Mengenai sarana publik Pemerintah Desa Condongcatur sebenarnya sudah menyediakan seperti papan informasi hanya saja Pemerintah Desa Condongcatur tidak memanfaatkannya untuk memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran terutama untuk anggaran dari ADD.